Vol. 11, No. 2, 2026, pp. 551-561
DOI: https://doi.org/10.29210/30037026000

Contents lists available at Journal ELORA

JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
ISSN: 2502-079X (Print) ISSN: 2503-1619 (Electronic)

Journal homepage: https://jrti.eloracenter.org/jrti



Inclusive development and poverty alleviation: An action research diagnosis

Afni Nooraini*), Mansyur Achmad, Afif Syarifudin Yahya
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Sept 17th, 2026
Revised Oct 05th, 2026
Accepted Nov 18th, 2026

Keyword:

Action research,
Inclusive development,
Indigenous papuans,
New autonomous region,
Poverty alleviation

ABSTRAK

This study reported the first cycle of a multi-cycle action research project in Central Papua, a province created in 2022. It asked whether development had benefited poor people. Data came from a group discussion with 40 provincial stakeholders, a group discussion with four working groups of the Papua Special Autonomy Acceleration Steering Agency (BP3OKP), an interview, field observation and official statistics. The data were analysed thematically using three dimensions of inclusive development: wellbeing, power and sustainability. Human development improved slightly, but poverty rose to 30.41 percent in March 2026 and was nine times higher in villages than in towns. None of the twelve sub-dimensions was rated strong. The main finding was an inclusion conversion gap: funds, facilities and participation forums had not turned into usable services, real influence and income that stays in villages. Insecurity and unclear authority decided which villages were reached.

© 2026 The Authors.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)

Corresponding Author:

Afni Nooraini
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Email: afni.na@ipdn.ac.id

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi masalah pembangunan terbesar di dunia. Bank Dunia memperkirakan sekitar 831 juta orang, atau 1 dari 10 penduduk dunia, hidup dengan penghasilan kurang dari US$3,00 per hari pada 2025. Hampir tiga perempatnya tinggal di perdesaan, dan sebagian besar berada di wilayah yang rapuh atau dilanda konflik (World Bank, 2025). Orang miskin biasanya mengalami kekurangan atas pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak secara sekaligus (D'Attoma and Matteucci, 2024). Pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan. Kemiskinan bisa turun jika tenaga kerja pindah ke pekerjaan yang lebih produktif (Erumban and de Vries, 2024) dan jika pemerintahan dikelola dengan baik sehingga hasil pembangunan sampai ke semua kelompok (Stylianou et al., 2025). Oleh karena itu, prinsip "leaving no one behind" menjadi inti Agenda 2030, dan prinsip ini hanya dapat terwujud jika kelembagaan pemerintah dan pemerintah daerah dirancang untuk mencapainya (de Jong, Princen and Vijge, 2025).

Provinsi Papua Tengah dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022. Tujuannya adalah mendekatkan pelayanan pemerintah dan mempercepat kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) dalam kerangka Otonomi Khusus (Republik Indonesia, 2022). Namun setelah Provinsi Papua Tengah berdiri, persentase penduduk miskin justru naik dari 27,60 persen pada September 2024 menjadi 30,41 persen pada Maret 2026. Kemiskinan di desa mencapai 39,37 persen, sedangkan di kota hanya 4,18 persen (Badan Pusat Statistik, 2026; Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2026b). Padahal nilai produk domestik regional bruto (PDRB) per penduduk mencapai Rp107,57 juta, terutama karena kontribusi sektor pertambangan (Badan Pusat Statistik

Provinsi Papua, 2026a). Provinsi Papua Tengah merupakan daerah yang kaya tetapi banyak warganya yang hidup dengan kemiskinan.

Terdapat tiga alasan mengapa penelitian ini menjadi penting. Pertama, tahun-tahun awal sebuah daerah otonom baru (DOB) adalah masa ketika aturan dan lembaganya dibentuk. Pengalaman pemekaran di Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan awal daerah baru bisa memudar dan hasilnya sangat berbeda antardaerah (Uluwiyah et al., 2025). Kedua, Dana Otonomi Khusus sebesar 2,25 persen dari plafon dana alokasi umum nasional akan terus mengalir hingga 2041 (Republik Indonesia, 2021). Tanpa pemetaan masalah yang tepat, maka dana sebesar itu bisa terus jatuh ke wilayah yang mudah dijangkau saja. Ketiga, jika warga tetap miskin setelah provinsi baru berdiri, maka masyarakat bisa kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya belum memberikan bukti yang kuat bahwa pemekaran dan otonomi khusus mengurangi kemiskinan. Usulan pembentukan DOB di Tanah Papua lebih banyak didorong oleh kepentingan elite sedangkan masyarakat sipil jarang dilibatkan (Muksiin et al., 2021). Evaluasi dua puluh tahun otonomi khusus menemukan bahwa layanan publik belum efektif, belum terbuka, dan belum dapat dipertanggungjawabkan dengan baik (Prabowo et al., 2021). Dana Otonomi Khusus baru menurunkan kemiskinan jika dibelanjakan secara efisien (Kumala, Mulyanto and Sarjiyanto, 2024). Di Indonesia secara umum bahwa anggaran pemerintah daerah yang besar bahkan dapat memperburuk akses layanan jika tidak disertai dengan pengawasan (Lewis, 2017).

Kajian lain tentang Tanah Papua banyak membahas strategi menjaga stabilitas pembangunan (Agustus et al., 2025), kekerasan terhadap warga sipil (Arfiansyah, 2026), serta pertambangan dan perampasan tanah (Blesia, Hatcher and Ratuva, 2025). Dari kajian tersebut, terdapat tiga kekosongan penelitian. Pertama, studi tentang pemekaran dan otonomi khusus umumnya memakai angka statistik dan menilai pertumbuhan ekonomi atau efisiensi belanja (Kumala, Mulyanto and Sarjiyanto, 2024; Uluwiyah, Nachrowi and Nuryakin, 2025). Studi tersebut belum menilai apakah pembangunan di provinsi baru menjangkau semua kelompok. Kedua, kajian tentang Papua cenderung membahas keamanan, pertambangan, dan kelembagaan secara terpisah. Padahal ketiganya dialami bersamaan oleh rumah tangga miskin. Ketiga, konsep pembangunan inklusif, yaitu pembangunan yang menjangkau dan melibatkan semua kelompok, masih jarang diterapkan pada pemerintahan daerah yang baru dibentuk (Pouw and Gupta, 2017). Penelitian ini memakai kerangka Gupta et al. (2015), yang menilai pembangunan dari tiga sisi, yaitu: apakah pembangunan meningkatkan kesejahteraan (enhance wellbeing), menambah kuasa atau kendali warga (increase power), dan menjaga keberlanjutan (promote sustainability).

Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana pembangunan di Provinsi Papua Tengah menjangkau dan menguntungkan penduduk miskin, menemukan titik-titik yang menghambat sumber daya pembangunan sampai menjadi manfaat bagi rumah tangga miskin, dan menyusun rencana tindakan bersama para pemangku kepentingan untuk tahap berikutnya. Kebaruan penelitian ini ada pada tiga hal. Pertama, ketiga sisi kerangka pembangunan inklusif (Pouw and Gupta, 2017) diterapkan secara utuh pada sebuah DOB. Kedua, memperkenalkan konsep celah konversi inklusi (inclusion conversion gap) yaitu kegagalan mengubah dana, fasilitas, dan forum partisipasi menjadi layanan yang benar-benar dapat dipakai, suara yang benar-benar didengar, dan penghasilan yang beredar di kampung. Konsep ini dikembangkan dari gagasan faktor konversi dalam pendekatan kapabilitas, yaitu pandangan bahwa sumber daya baru bermakna jika orang benar-benar dapat memanfaatkannya (Robeyns, 2017). Ketiga, mengusulkan rasa aman untuk menjangkau layanan dan kejelasan pembagian kewenangan sebagai syarat agar pembangunan di DOB dapat dilaksanakan secara inklusif dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini adalah riset tindakan partisipatif, yaitu penelitian yang dilakukan bersama para pemangku kepentingan untuk memecahkan masalah nyata secara bertahap dalam beberapa siklus (Kemmis, McTaggart and Nixon, 2014). Penelitian ini melaporkan siklus pertama, yang disebut tahap pengenalan masalah (reconnaissance). Tahap ini terdiri atas empat langkah, yaitu: memetakan masalah, merenungkan temuan bersama, menyusun rencana tindakan, dan memaparkan hasilnya kembali kepada pemerintah daerah (Gambar 1). Rencana tindakan perlu disepakati lebih dulu sebelum diuji di kampung percontohan pada siklus kedua.



Gambar 1. Tahapan siklus pertama riset tindakan

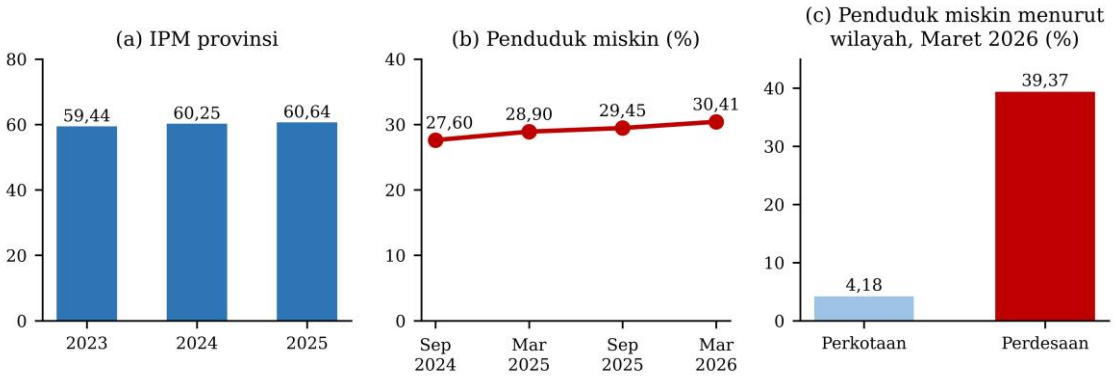
(sumber: peneliti, 2026)

Data dikumpulkan di Nabire pada tanggal 30 Juli–2 Agustus 2026 dengan bantuan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yang mengundang 20 unsur pemerintah dan masyarakat. Pengumpulan data memakai tiga cara. Cara pertama adalah diskusi kelompok terarah (focus group discussion) dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah beserta stakeholder (FGD-P) pada 30 Juli 2026. Diskusi ini dihadiri 40 orang, yang terdiri dari: Sekretaris Daerah, dua asisten, pejabat dan staf dari berbagai dinas dan biro, serta wakil Badan Musyawarah Antar Gereja, Majelis Ulama Indonesia, dan organisasi pengusaha perempuan. Wakil lembaga adat dan organisasi pemuda diundang, tetapi tidak hadir. Cara kedua adalah diskusi kelompok dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) (FGD-B) pada tanggal 31 Juli 2026. Diskusi ini melibatkan ketua dan anggota empat kelompok kerja, yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Papua Polhukam. Cara ketiga adalah wawancara mendalam dengan Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah (W-BP) pada tanggal 30 Juli 2026. Peserta dipilih karena memiliki kewenangan atau terlibat langsung dalam program pengentasan kemiskinan dan otonomi khusus. Pertanyaan diskusi disusun dari tiga sisi kerangka Gupta et al. (2015). Nama peserta tidak dicantumkan, dan kutipan hanya ditandai dengan kode FGD-P, FGD-B, atau W-BP. Data pendukung berasal dari statistik Badan Pusat Statistik (BPS), data Kementerian Kesehatan, peraturan, dan pengamatan lapangan.

Data dianalisis dengan analisis tematik, yaitu mengelompokkan isi pembicaraan ke dalam tema-tema secara bertahap (Braun and Clarke, 2006). Pengelompokan awal mengikuti sub-dimensi dalam kerangka pembangunan inklusif (Pouw and Gupta, 2017), lalu ditambah tema baru yang muncul dari data (Fife and Gossner, 2024). Peneliti mengode transkrip secara terpisah, lalu menyelesaikan perbedaan melalui diskusi hingga sepakat. Untuk memeriksa kebenaran data, keterangan dari FGD-P, FGD-B, dan W-BP dibandingkan satu sama lain dan dengan data BPS serta KementerianTerkait. Jika ada perbedaan maka data yang digunakan adalah data resmi pemerintah atau pemerintah daerah, sedangkan angka yang hanya disebut secara lisan dianggap sebagai petunjuk awal. Setiap sub-dimensi dinilai kuat jika didukung data resmi dan semua sumber sepakat, parsial jika program sudah ada tetapi manfaatnya belum merata atau keterangan antarsumber berbeda, dan lemah jika indikator resmi memburuk atau semua sumber menunjukkan hambatan yang belum ditangani. Pedoman pertanyaan dan daftar kode tersedia sebagai materi tambahan. Penelitian tentang masyarakat adat di Australia, Kanada, dan Amerika Latin dipakai sebagai pembanding karena mereka menghadapi kondisi yang mirip, yaitu tanah adat, letak yang terpencil, dan tekanan pertambangan. Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain: tidak ada survei rumah tangga, sebagian besar peserta berasal dari pemerintah daerah, wakil lembaga adat dan pemuda tidak hadir, dan peneliti tidak mengunjungi distrik yang rawan konflik.

Hasil dan Pembahasan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Tengah mengalami kenaikan dari 59,44 pada 2023 menjadi 60,64 pada 2025. Namun, pada saat yang sama kemiskinan terus naik (Gambar 2). Perbedaan capaian IPM antarkabupaten juga besar. IPM Mimika 77,27 sedangkan IPM Puncak hanya 45,95 (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2025a). Informan dari BP3OKP mengingatkan bahwa IPM rata-ratanya terus mengalami kenaikan karena komponennya terus bertambah dari tahun ke tahun. Tetapi di sisi lain di Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya, banyak lulusan SD tidak melanjutkan sekolah karena sekolahnya berhenti beroperasi atau penduduknya mengungsi (FGD-B). Tabel 1 menunjukkan bahwa kemiskinan di Papua Tengah adalah gabungan dari kekurangan pangan, sanitasi, layanan kesehatan, serta akses internet dan transportasi.



Gambar 2. IPM, Persentase Penduduk Miskin, dan Kesenjangan Kota–Desa di Papua Tengah

(sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik, 2026; Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2025a, 2026b)

Tabel 1. Indikator Kunci Kesejahteraan Material Provinsi Papua Tengah

Indikator	Nilai	Sumber
Penduduk miskin, Maret 2026	30,41% (kota 4,18%; desa 39,37%)	Badan Pusat Statistik (2026)
IPM 2025 (tertinggi–terendah)	60,64 (Mimika 77,27; Puncak 45,95)	BPS Provinsi Papua (2025a)
Pangsa pengeluaran makanan 2024	59,63% (desa 65,25%; Puncak 73,82%)	BPS Provinsi Papua (2025b)
Prevalensi stunting 2023	39,4%	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (2024)
Sanitasi layak / rumah layak huni 2025	39,73% / 30,95%	BPS Provinsi Papua (2025c)
Akses internet penduduk ≥5 tahun 2025	32,64% (Mimika 78,65%; Puncak 0,38%)	BPS Provinsi Papua (2025c)
Puskesmas dengan 9 jenis nakes lengkap	18 dari 127 (14,17%)	Kementerian Kesehatan (2026a, 2026b)
PDRB per kapita 2025; pertumbuhan dengan/tanpa tambang	Rp107,57 juta; −21,80% / +3,16%	BPS Provinsi Papua (2026a)

Dari sisi kesejahteraan, masalah utamanya bukan karena fasilitas tidak ada, tetapi karena fasilitas yang ada belum berfungsi memberikan layanan yang optimal. Kondisi seperti ini dinilai sebagai negara yang "tampak seperti negara" dimana bangunan dan lembaganya ada tetapi kemampuan menjalankannya belum terbentuk (Pritchett, Woolcock and Andrews, 2013). BP3OKP telah memetakan empat kelompok anak tidak sekolah, yaitu: anak di wilayah tanpa sekolah dan guru; anak di wilayah yang ada sekolah tetapi gurunya tinggal di kota; anak di wilayah yang ada guru tetapi gurunya belum memenuhi syarat; dan anak di wilayah dengan sekolah lengkap, yang umumnya hanya ada di kota (FGD-B). Setiap kelompok membutuhkan penanganan yang berbeda, misalnya guru dengan insentif, asrama, belajar di rumah bagi anak dari daerah konflik, dan peningkatan kemampuan guru lokal. Sebagian calon guru yang sudah lulus seleksi untuk ditugaskan ke Kabupaten Intan Jaya bahkan menolak ditempatkan, dan perangkat internet di sekolah serta puskesmas mendapat ancaman (FGD-P). Perjalanan darat ke beberapa lokasi membutuhkan waktu satu sampai dua minggu, dan program disebut hanya dirasakan di "daerah-daerah aman" (FGD-P). Temuan ini sesuai dengan kajian yang menunjukkan bahwa lama dan biaya perjalanan menjadi penghalang utama layanan di wilayah terpencil (Mseke, Jessup and Barnett, 2024). Hambatan yang terjadi di Provinsi Papua Tengah lebih berat karena jarak diukur dalam hari hingga minggu dan ditambah permasalahan keamanan. Oleh karena itu, model layanan yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yaitu layanan menetap (*fixed*), campuran (*mixed*), dan keliling (*outreach*) (FGD-P). Dan model layanan ini dinilai lebih tepat daripada sekadar membangun fasilitas baru.

Di Kabupaten Puncak, terdapat 73,82 persen pengeluaran rumah tangga yang dipakai untuk makanan. Akibatnya bahwa gangguan kecil saja pada pengiriman barang dapat langsung berubah menjadi krisis gizi (Faharuddin *et al.*, 2023; Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2025b). Namun, warga juga memiliki ketahanan pangan yang tidak tercatat dalam statistik, yaitu: kebun, sagu, ikan danau, dan kebiasaan berbagi dalam marga. Anderson et al. (2024) menemukan bahwa tradisi pangan memperkuat kesejahteraan masyarakat adat melalui hubungan sosial dan akses terhadap pangan tradisional (Anderson *et al.*, 2024). Perbedaannya bahwa di Provinsi Papua Tengah sumber pangan lokal juga terancam oleh hilangnya lahan dan gangguan keamanan. Bantuan sosial pun belum tepat sasaran. Data penerima bantuan sering tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sekitar

834 ribu penduduk tercatat dalam kelompok 40 persen termiskin, tetapi perpindahan penduduk dan ketiadaan dokumen kependudukan membuat bantuan salah sasaran. Iuran jaminan ketenagakerjaan bagi sekitar 23.000 pekerja rentan juga sempat tidak dibayar selama beberapa bulan (FGD-P).

Dari sisi hubungan sosial dan rasa aman, gereja dan lembaga adat menjadi tempat warga bergantung. Seorang informan menyebut "peran gereja lebih sentral" (W-BP). Namun, janji ganti rugi tanah yang tidak ditepati meninggalkan "terlalu banyak trauma masalah tanah" (FGD-B). Nelayan OAP dengan perahu kecil (1–5 GT) kalah bersaing dengan kapal dari luar sehingga orang Papua tidak dapat apa-apa (FGD-P). Ketika hubungan warga dengan tanahnya diputus tanpa persetujuan, maka yang hilang adalah pangan, martabat, dan rasa aman. Pernyataan "Ini DOB ada, tapi kenapa kami masih tetap miskin?" (FGD-P) menunjukkan kekecewaan yang mendalam, bukan sekadar keluhan. Menurut peserta, warga yang berulang kali didata tetapi tidak pernah menerima layanan merasa diabaikan. Oleh karena itu, setiap kegiatan pendataan sebaiknya sekaligus dipakai untuk memberi layanan.

Dari sisi kuasa, warga belum mampu menentukan arah pembangunan. Warga hadir dalam forum, tetapi tidak ikut menentukan isi pembahasan. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kampung, "masyarakat tidak dilibatkan, bahkan tokoh adat, tokoh agama … tidak dilibatkan", dan di tingkat distrik terjadi "politisasi" usulan (FGD-P). BP3OKP sendiri mengaku dalam Musrenbang hanya "hadir untuk mendengarkan saja atau diberi kesempatan untuk memberi sambutan" (FGD-B). Usulan warga sudah masuk ke sistem, tetapi tidak dapat dilacak. Menu aspirasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah hampir tidak dipakai selama dua tahun (FGD-P). Usulan yang dapat dilacak pun sering terhambat karena urusannya menjadi kewenangan kabupaten. Merino (2025) menjelaskan bahwa hak masyarakat adat untuk menyetujui atau menolak sebuah proyek dapat menguatkan posisi mereka, tetapi juga dapat menjadi alat pemerintah atau pemerintah daerah, tergantung seberapa kuat organisasi adatnya. Klein et al. (2023) juga menemukan bahwa partisipasi sering berhenti pada formalitas (Klein, Muñoz-Torres and Fernández-Izquierdo, 2023). Di Provinsi Papua Tengah masalahnya bukan hanya cara konsultasi tetapi juga lembaga DOB yang belum menyatukan kewenangan, data, dan anggaran pada satu pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian bahwa saluran untuk bersuara sudah ada, tetapi suara warga belum berubah menjadi tindakan nyata (Gupta, Pouw and Ros-Tonen, 2015).

Kesenjangan antara hadir dan didengar paling jelas terlihat pada perempuan. Peserta perempuan dari BP3OKP menyatakan bahwa forum perencanaan didominasi laki-laki dan program pemerintah "hanya sebatas program", sementara kuota perempuan dalam pencalonan anggota legislatif sering hanya dipenuhi di atas kertas (FGD-B). Cayul dan Corvalan (2024) menemukan bahwa pengaruh wakil masyarakat adat bergantung pada kedekatannya dengan warga yang diwakilinya (Cayul and Corvalan, 2024). Oleh karena itu, forum perempuan kampung perlu diberi anggaran sebagai bagian tetap dari perencanaan, dan bukan sekadar acara seremonial.

Warga juga belum menguasai aset dan data. Tanah ulayat disebut sebagai aset mati yang belum dapat menghasilkan uang, dan pemuda yang terampil tetap menghadapi "susahnya di pasar" (FGD-B). Data OAP juga "agak susah untuk mendapatkan" (W-BP). Akibatnya, terdapat sebagian warga tidak hanya miskin, tetapi juga tidak tercatat oleh negara. Prinsip CARE dalam pengelolaan data masyarakat adat menuntut agar data memberi manfaat bersama, dikendalikan oleh masyarakat yang bersangkutan, dikelola secara bertanggung jawab, dan dijalankan secara etis (Garba *et al.*, 2023; Jennings *et al.*, 2023). Prinsip ini dapat diterapkan melalui dewan data OAP yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Majelis Rakyat Papua, lembaga adat, gereja, dan wakil perempuan, dibantu kader data kampung yang dipilih warga.

Upaya agar warga berdaya dari dalam mulai terlihat, misalnya dengan menghubungkan nelayan OAP ke pasar ekspor dan menyediakan fasilitas pendingin ikan danau (FGD-P). Namun, koperasi OAP belum ikut menentukan harga, mutu, dan pembagian keuntungan. Jiménez-Aceituno et al. (2025), setelah meneliti 127 inisiatif di Ekuador, Peru, dan Kolombia, menemukan bahwa inisiatif yang dipimpin masyarakat adat paling mampu membawa perubahan. Oleh karena itu, pemberdayaan di Provinsi Papua Tengah perlu tumbuh dari organisasi OAP yang mengelola usahanya sendiri.

Dari sisi keberlanjutan, bahwa risiko terbesar adalah ketergantungan pada pertambangan. Pada tahun 2025, ekonomi Papua Tengah yang dihitung bersama tambang mengalami penyusutan sebesar 21,80 persen, sedangkan ekonomi di luar tambang tumbuh 3,16 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2026a). Informan dari BP3OKP mengemukakan bahwa "Bagaimana kita mau menuntaskan kemiskinan ketika uang yang masuk saja tidak beredar di masyarakat," dan mempersoalkan pelaksana proyek yang didatangkan dari luar (FGD-B). Informan dari pemerintah menyatakan bahwa "dari unsur sumber daya alam kami dieksploitasi terus" dan berdampak terganggunya air permukaan (FGD-P). Scheidel et al. (2023) setelah meneliti 3.081 konflik lingkungan di dunia menemukan bahwa masyarakat adat terdampak dalam sedikitnya 34 persen konflik,

terutama berupa hilangnya bentang alam, mata pencaharian, dan tanah (Scheidel *et al.*, 2023). Pola serupa terlihat di Papua Tengah, sesuai dengan kajian tentang tambang Grasberg dan pertambangan di Tanah Papua (Blesia, Hatcher and Ratuva, 2025; Malinda, 2025). Informan juga menyebut bahwa perusahaan tambang besar menyumbang puluhan triliun rupiah per tahun kepada negara, tetapi yang kembali ke daerah jauh lebih kecil (FGD-P). Namun, anggapan bahwa pembagian hasil tidak adil saja sudah melemahkan kepercayaan warga. Hal ini sejalan dengan temuan Leyton-Flor dan Sangha (2024) bahwa pertambangan dapat menurunkan kesejahteraan dan merusak lingkungan hidup masyarakat adat (Leyton-Flor and Sangha, 2024).

Pengiriman pangan dan layanan juga mudah terputus. Hal ini sejalan dengan penyampaian informan bahwa "kalau misalnya ada longsor, distribusinya tidak jalan", dan beberapa wilayah "cuma bisa dilalui oleh udara" (FGD-P). Di Guyana, studi yang dilakukan Hayes et al. (2025) menemukan bahwa kampung tambang rentan terhadap kerusakan sumber daya alam, sedangkan kampung petani lebih rentan terhadap banjir dan semakin berkurangnya pilihan mata pencaharian (Hayes *et al.*, 2025). Papua Tengah memiliki kedua jenis kerentanan ini. Wilayah tambang memerlukan sumber ekonomi lain dan pemulihan lingkungan, sedangkan wilayah pegunungan memerlukan perlindungan pangan lokal, jalan dan jembatan yang tahan bencana, serta akses ke pasar. Informan dari BP3OKP juga menekankan perlunya kapal terjadwal dan subsidi penerbangan bagi wilayah yang hanya dapat dicapai lewat udara (FGD-B). Subsidi ini sebaiknya dipandang sebagai penopang pasar dan layanan, dan bukan sekadar beban anggaran.

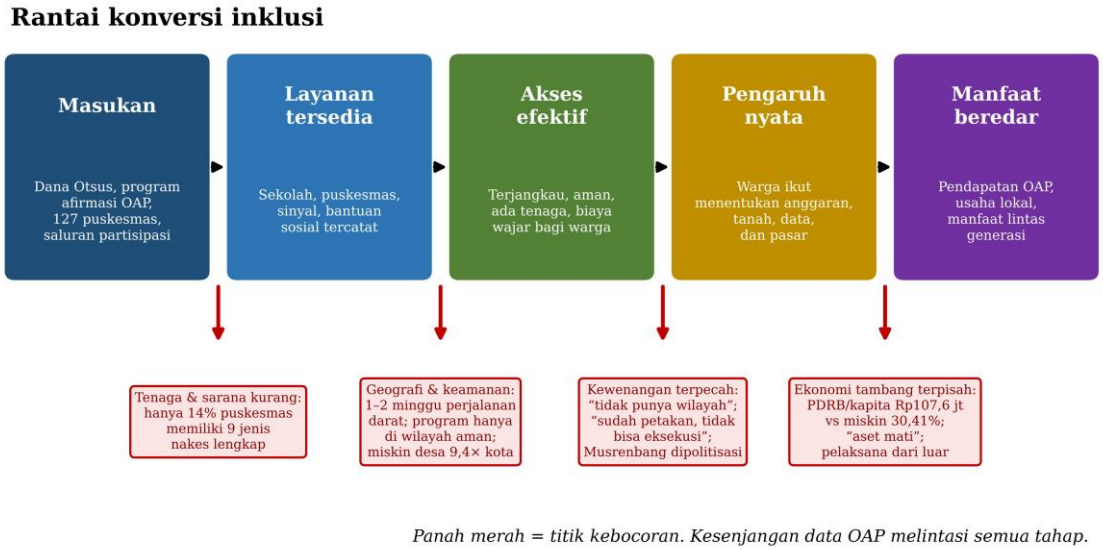
Kekuatan yang belum dimanfaatkan adalah pengetahuan masyarakat adat tentang alam dan inisiatif lokal, seperti sekitar 20 kelompok perhutanan sosial dan pengolahan sampah di Wanggar (FGD-P). Pengembangan hasil hutan bukan kayu, kopi, perikanan danau, dan jasa lingkungan perlu disertai perjanjian tertulis tentang pembagian manfaat. Untuk melindungi hak generasi mendatang, maka penelitian ini mengusulkan prinsip *non-substitusi berjenjang*, artinya bahwa kerugian besar terhadap hak warga, keselamatan, dan fungsi lingkungan tidak boleh ditukar dengan keuntungan ekonomi. Prinsip ini dijalankan dengan memeriksa tiga aspek, yaitu: dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi, sebelum sebuah proyek didanai. Gagasan ini sejalan dengan alat analisis kebijakan berbasis keadilan bagi masyarakat adat (Jones, Reid and Macmillan, 2024). Pertanyaan kuncinya adalah apakah keputusan hari ini memperluas atau mempersempit pilihan anak-anak Papua Tengah ketika mereka dewasa. Penerimaan dari tambang bersifat sementara, sedangkan tanah, hutan, air, bahasa, dan pengetahuan tidak dapat diganti dengan uang. Jika ketiga sisi dibandingkan, maka kelemahan di satu sisi dapat memperparah kelemahan di sisi lain. Layanan yang sulit dijangkau membuat suara kampung terpencil makin lemah. Lemahnya kendali warga atas tanah dan data membuka jalan bagi pemanfaatan sumber daya alam tanpa pembagian hasil yang adil. Kerusakan lingkungan kemudian kembali menurunkan ketersediaan pangan dan rasa aman. Kajian sebelumnya umumnya membahas satu sisi saja, misalnya akses layanan (Mseke, Jessup and Barnett, 2024), keterwakilan (Cayul and Corvalan, 2024), atau dampak pertambangan (Scheidel *et al.*, 2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa di DOB Papua Tengah ketiganya membentuk satu lingkaran yang harus diputus bersamaan. Oleh karena itu maka program yang paling tepat adalah program yang menyentuh lebih dari satu sisi sekaligus, misalnya: layanan keliling yang dijalankan bersama gereja dan lembaga adat, kader data kampung yang juga menampung pengaduan warga, dan koperasi OAP yang mengelola usaha pangan dan perikanan secara lestari. Hasil penilaian pada Tabel 2 menunjukkan bahwa dari dua belas sub-dimensi, tidak satu pun dinilai kuat. Hasilnya enam dinilai parsial dan enam lemah. Dengan demikian bahwa pembangunan di Papua Tengah dapat disebut progresif karena dana, fasilitas, dan angka rata-ratanya membaik, tetapi belum inklusif karena perbaikannya belum menjangkau kelompok termiskin, belum memberi mereka kendali, dan belum terjamin keberlanjutannya.

Tabel 2. Matriks penilaian pembangunan inklusif di Provinsi Papua Tengah

Dimensi	Sub-dimensi	Bukti utama	Status
Kesejahteraan	Material	IPM naik, kemiskinan desa 39,37%, stunting 39,4%	Lemah
	Relasional	Gereja dan adat kuat; trauma penyelesaian permasalahan tanah	Parsial
	Kognitif/psikologis	Ketakutan di daerah rawan; kekecewaan atas DOB	Lemah
Kuasa	Kendali atas aset	Tanah sebagai "aset mati"; nelayan kalah akses	Lemah
	Melawan dominasi	Pelaksana dan kapal dari luar; data OAP sulit	Lemah
	Representasi dan suara	Banyak saluran; Musrenbang dipolitisasi	Parsial
	Pemberdayaan dari dalam	Rintisan perikanan dan BLK; belum berbasis organisasi OAP	Parsial
Keberlanjutan	Sosial	Jejaring gereja; layanan terputus saat konflik	Parsial
	Lingkungan	Air permukaan; tekanan mineral	Lemah
	Ekonomi	Ekonomi tambang −21,80%; nontambang +3,16%	Lemah

Dimensi	Sub-dimensi	Bukti utama	Status
	Antargenerasi	Fokus pendidikan; belum ada dana warisan	Parsial
	Tata kelola lintas dimensi (tema baru)	Komitmen Otsus terpadu; koordinasi provinsi–kabupaten lemah	Parsial

Temuan terpenting penelitian ini adalah adanya *celah konversi inklusi* (Gambar 3). Papua Tengahsebenarnya tidak kekurangan sumber daya. Menurut Bapperida Provinsi Papua Tengah bahwa belanja khusus untuk OAP mencapai Rp727 miliar melalui 15 perangkat daerah pada 2026 (FGD-P); terdapat 127 puskesmas; dan tersedia banyak forum partisipasi. Namun, IPM hanya naik 1,20 poin selama 2023–2025, sedangkan kemiskinan naik 2,81 poin persen antara September 2024 dan Maret 2026. Kemiskinan di desa 9,4 kali lebih tinggi daripada di kota, dan hanya satu dari tujuh puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan lengkap (Tabel 1). Artinya bahwa sumber daya sudah tersedia tetapi belum berubah menjadi manfaat bagi warga miskin.



Gambar 3. Rantai konversi inklusi dan titik kebocorannya di Provinsi Papua Tengah

(sumber: sintesis peneliti dari data BPS, FGD-P, FGD-B, dan W-BP, 2026)

Celah ini muncul karena tiga kebocoran. Pertama, *program hanya menjangkau wilayah yang aman*. Akibatnya, kenaikan angka rata-rata terkumpul di wilayah yang sudah lebih sejahtera. Kajian tentang kekerasan di Tanah Papua menunjukkan bahwa warga mengandalkan jaringan lokal untuk melindungi diri (Arfiansyah, 2026). Oleh karena itu, jaringan gereja dan adat dapat dimanfaatkan sebagai jalur untuk menyampaikan layanan. Kedua, *pembagian kewenangan tidak jelas*. Pemerintah provinsi menyatakan bahwa mereka "tidak punya wilayah dan tidak punya rakyat" (FGD-P), sedangkan BP3OKP "sudah petakan, tetapi tidak bisa eksekusi" (FGD-B). Temuan ini melengkapi kajian tentang strategi BP3OKP yang menunjukkan bahwa masalahnya juga terletak pada susunan kewenangan (Agustus *et al.*, 2025). Ketiga, *ekonomi tambang terpisah dari ekonomi warga*. Kondisi ini menghasilkan rumah tangga yang kaya aset tetapi miskin uang tunai. Warga memiliki tanah, rumah, kebun, dan pangan sehari-hari, tetapi tanahnya tidak terhubung dengan pasar, modal, dan kepastian hukum (FGD-B). Oleh karena itu, ukuran kemiskinan yang hanya berdasarkan pengeluaran perlu dilengkapi dengan ukuran kesejahteraan menurut nilai-nilai setempat. Data layanan juga perlu dipisahkan antara wilayah aman dan wilayah rawan agar keberhasilan rata-rata tidak menutupi warga yang tertinggal.

Ketiga kebocoran ini menunjukkan bahwa ketiga sisi kerangka pembangunan inklusif saling bergantung satu sama lain. Kesejahteraan tidak akan bertahan jika warga tidak punya kendali atas data, tanah, dan anggaran. Pembangunan juga tidak akan berkelanjutan jika manfaatnya tidak beredar di kampung. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan dua syarat tambahan bagi DOB, yaitu rasa aman untuk menjangkau layanan dan kejelasan pembagian kewenangan. Penelitian ini juga mengusulkan agar keberhasilan pembangunan diukur dari *tingkat konversi*, yaitu seberapa besar sumber daya benar-benar berubah menjadi manfaat bagi warga, bukan dari besarnya anggaran atau banyaknya fasilitas. Dengan demikian bahwa temuan ini membenarkan bahwa tiga sisi dalam kerangka pembangunan inklusif tetap relevan, tetapi perlu penyesuaian untuk DOB. Pembangunan inklusif membutuhkan negara yang mampu menjangkau warga dan bertindak, sesuatu yang dalam kerangka aslinya cenderung dianggap sudah tersedia.

Ada tiga penjelasan lain yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kenaikan kemiskinan mungkin disebabkan oleh menyusutnya ekonomi tambang pada 2025. Namun, kemiskinan sudah naik sedikit demi sedikit pada setiap periode sejak September 2024, dan kenaikannya terpusat di desa (Gambar 2). Kedua, letak yang terpencil memang membuat layanan mahal, tetapi tidak menjelaskan mengapa wilayah yang dapat dijangkau pun tidak menerima manfaat ketika keamanannya terganggu atau kewenangannya tidak jelas. Ketiga, lemahnya pengelolaan pemerintahan dan kebiasaan lama yang diwarisi dari provinsi induk memang berpengaruh, tetapi justru memperkuat kesimpulan bahwa yang kurang adalah kemampuan mengubah sumber daya menjadi manfaat, dan bukan sumber dayanya (Lewis, 2017; Prabowo *et al.*, 2021). Selain itu, ukuran kemiskinan berdasarkan pengeluaran dapat mengabaikan pangan yang dihasilkan sendiri. Oleh karena itu, angka kemiskinan perlu dipahami dengan hati-hati, tetapi hal ini tidak menghapus kesenjangan yang sangat besar antara desa dan kota.

Rencana tindakan untuk siklus kedua (Tabel 3) disusun dari usulan peserta kedua diskusi. Titik tolaknya adalah pernyataan Sekretaris Daerah bahwa pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan terkoneksi satu dengan yang lain sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara komprehensif (FGD-P). Empat tindakan dipilih berdasarkan tiga syarat, yaitu: dapat menutup lebih dari satu titik kebocoran pada Gambar 3, berada dalam kewenangan provinsi atau BP3OKP, dan berasal dari masalah atau usulan yang disampaikan peserta.

Tabel 3. Rencana tindakan siklus kedua

Masalah hasil diagnosis	Tindakan	Pelaku utama	Indikator keberhasilan
Layanan sulit dijangkau dan data tidak akurat	Sistem pemantauan kesejahteraan kampung dengan kader data lokal	Bapperida, Dukcapil, BPS, gereja, lembaga adat	Waktu dan biaya tempuh ke layanan; data OAP terverifikasi
Aspirasi tidak berpengaruh	Kode lacak usulan Musrenbang dan kuota forum perempuan dan pemuda	Bapperida, distrik, BP3OKP	Porsi usulan kampung yang masuk anggaran beserta alasan penolakan
Manfaat tidak beredar di kampung	Paket pengadaan untuk usaha OAP dan koperasi rantai pasok ikan	Biro Pembangunan, DKP, Koperasi	Porsi belanja yang diterima usaha lokal; pendapatan bersih OAP
Risiko lingkungan dan antargenerasi	Uji tiga neraca keberlanjutan sebelum proyek didanai	Bapperida, DLHK, MRP	Proyek yang lolos uji; pemantauan air bersama warga

Secara teori, temuan penelitian ini menambah pemahaman tentang kemiskinan yang dilihat dari banyak sisi (D'Attoma & Matteucci, 2024). Di DOB Papua Tengah bahwa rasa aman dan kejelasan kewenangan menentukan apakah perbaikan angka rata-rata benar-benar sampai ke rumah tangga. Temuan ini juga memperluas kajian tentang partisipasi masyarakat di wilayah tambang (Klein, Muñoz-Torres and Fernández-Izquierdo, 2023; Karso, 2025) dan menghubungkan konsep pembangunan inklusif dengan gagasan faktor konversi (Robeyns, 2017) serta lemahnya kemampuan negara dalam menjalankan program (Pritchett, Woolcock and Andrews, 2013). Siklus berikutnya perlu mengukur tingkat konversi secara langsung di kampung percontohan. Karena penelitian ini didominasi peserta dari pemerintah dan belum didukung survei rumah tangga, siklus berikutnya juga perlu melibatkan warga kampung, perempuan, dan pemuda sebagai peneliti bersama, serta menguji ukuran kesejahteraan menurut nilai-nilai setempat.

Simpulan

Pembangunan di Provinsi Papua Tengah sudah progresif karena dana, fasilitas, dan angka rata-ratanya membaik, tetapi belum inklusif karena tidak satu pun dari dua belas sub-dimensi dinilai kuat. Dari sisi kesejahteraan, bahwa kemajuan belum sampai ke kampung pegunungan, wilayah rawan konflik, dan rumah tangga di desa. Dari sisi kuasa, bahwa forum partisipasi sudah banyak, tetapi warga belum dapat mengendalikan tanah, data, pasar, dan anggaran. Dari sisi keberlanjutan, bahwa ketergantungan pada pertambangan, manfaat yang mengalir ke luar daerah, dan pengiriman barang yang mudah terputus mengancam manfaat jangka panjang. Ketiga masalah ini bertemu dalam celah konversi inklusi, yaitu: kegagalan mengubah dana, fasilitas, dan forum partisipasi menjadi layanan yang dapat dipakai, suara yang didengar, dan penghasilan yang beredar di kampung. Temuan ini menambahkan dua syarat pada kerangka pembangunan inklusif untuk DOB, yaitu rasa aman untuk menjangkau layanan dan kejelasan pembagian kewenangan, serta mengusulkan tingkat konversi sebagai ukuran keberhasilan. Empat tindakan prioritas yang perlu dilakukan yaitu: pemantauan kesejahteraan kampung, pelacakan usulan Musrenbang, pengadaan barang dan jasa yang mengutamakan usaha OAP, dan pemeriksaan tiga aspek/neraca keberlanjutan. Hal ini perlu diuji pada siklus kedua di kampung percontohan dengan melibatkan OAP, perempuan, dan pemuda sejak tahap perencanaan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis berterima kasih kepada Lembaga Penelitian Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang telah memberikan dukungan pelaksanaan dan dana penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, BP3OKP Wilayah Papua Tengah, dan seluruh informan yang telah membantu memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Referensi

Agustus, F.S. et al. (2025) 'Strengthening the Papua Steering Committee strategy: Reducing instability for accelerated development in Papua, Indonesia', Social Sciences & Humanities Open, 11, p. 101413. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101413.

Anderson, K. et al. (2024) 'Pathways between foodways and wellbeing for First Nations Australians', BMC Public Health, 24, p. 502. Available at: https://doi.org/10.1186/s12889-024-18005-y.

Arfiansyah, A. (2026) 'Violence and civilian strategy for protection in West Papua, Indonesia', Journal of Peacebuilding & Development, 21(1), pp. 70–84. Available at: https://doi.org/10.1177/15423166251357724.

Badan Pusat Statistik (2026) 'Persentase penduduk miskin (P0) menurut provinsi dan daerah'. Badan Pusat Statistik. Available at: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-dan-daerah.html.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (2025a) 'Indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Papua Tengah tahun 2025'. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. Available at: https://papua.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/1353/indeks-pembangunan-manusia--ipm--provinsi-papua-tengah-tahun-2025.html.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (2025b) Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Papua Tengah tahun 2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. Available at: https://papua.bps.go.id/id/publication/2025/07/01/7034de22d836f1bbb4408cf5/pengeluaran-untuk-konsumsi-penduduk-papua-tengah-tahun-2024.html.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (2026a) 'Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Tengah triwulan IV-2025'. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. Available at: https://papua.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/06/1431/pertumbuhan-ekonomi-provinsi-papua-tengah-triwulan-iv-2025.html.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (2026b) 'Profil kemiskinan Provinsi Papua Tengah, September 2025'. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. Available at: https://papua.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/06/1395/profil-kemiskinan-provinsi-papua-tengah--september-2025.html.

Blesia, J.U., Hatcher, P. and Ratuva, S. (2025) 'Predatory mining, conflict and political spaces: The case of Grasberg mine in West Papua', Society & Natural Resources, 39(2), pp. 263–283. Available at: https://doi.org/10.1080/08941920.2025.2553355.

Braun, V. and Clarke, V. (2006) 'Using thematic analysis in psychology', Qualitative Research in Psychology, 3(2). Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa.

Cayul, P. and Corvalan, A. (2024) 'Indigenous representation and participation: The case of the Chilean Mapuche', Electoral Studies, 90, p. 102818. Available at: https://doi.org/10.1016/j.electstud.2024.102818.

D'Attoma, I. and Matteucci, M. (2024) 'Multidimensional poverty: An analysis of definitions, measurement tools, applications and their evolution over time through a systematic review of the literature up to 2019', Quality & Quantity, 58(4), pp. 3171–3213. Available at: https://doi.org/10.1007/s11135-023-01792-8.

Erumban, A.A. and de Vries, G.J. (2024) 'Structural change and poverty reduction in developing economies', World Development, 181, p. 106674. Available at: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106674.

Faharuddin, F. et al. (2023) 'Impact of food price increases on poverty in Indonesia: Empirical evidence from cross-sectional data', Journal of Asian Business and Economic Studies, 30(2), pp. 126–142. Available at: https://doi.org/10.1108/JABES-06-2021-0066.

Fife, S.T. and Gossner, J.D. (2024) 'Deductive Qualitative Analysis: Evaluating, Expanding, and Refining Theory', International Journal of Qualitative Methods [Preprint]. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.1177/16094069241244856.

Garba, I. et al. (2023) 'Indigenous Peoples and research: Self-determination in research governance', Frontiers in Research Metrics and Analytics, 8, p. 1272318. Available at: https://doi.org/10.3389/frma.2023.1272318.

Gupta, J., Pouw, N.R.M. and Ros-Tonen, M.A.F. (2015) 'Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development', European Journal of Development Research, 27(4). Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.1057/ejdr.2015.30.

Hayes, W.M. et al. (2025) 'Assessing the livelihood vulnerability of rural Guyanese communities due to accelerating environmental change', Regional Environmental Change, 25, p. 136. Available at: https://doi.org/10.1007/s10113-025-02460-3.

Jennings, L. et al. (2023) 'Applying the "CARE Principles for Indigenous Data Governance" to ecology and biodiversity research', Nature Ecology & Evolution, 7(10), pp. 1547–1551. Available at: https://doi.org/10.1038/s41559-023-02161-2.

Jones, R., Reid, P. and Macmillan, A. (2024) 'An Indigenous climate justice policy analysis tool', Climate Policy, 24(8), pp. 1080–1095. Available at: https://doi.org/10.1080/14693062.2024.2362845.

de Jong, E., Princen, S. and Vijge, M.J. (2025) 'Fulfilling the promise of "leaving no one behind": Exploring institutional pathways to success', Sustainable Development, 33(S1), pp. 77–90. Available at: https://doi.org/10.1002/sd.3555.

Karso, A.J. (2025) 'Natural resources governance and the vulnerability of indigenous communities in Indonesia', Frontiers in Political Science, 7. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1601480.

Kemmis, S., McTaggart, R. and Nixon, R. (2014) The action research planner: Doing critical participatory action research. Singapore: Springer. Available at: https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2.

Klein, L., Muñoz-Torres, M.J. and Fernández-Izquierdo, M.Á. (2023) 'A comparative account of indigenous participation in extractive projects: The challenge of achieving Free, Prior, and Informed Consent', The Extractive Industries and Society, 15, p. 101270. Available at: https://doi.org/10.1016/j.exis.2023.101270.

Kumala, S.N., Mulyanto, M. and Sarjiyanto, S. (2024) 'Efficiency of special autonomy of Papua: Does it have an effect on the poverty rate?', Jurnal Borneo Administrator, 20(3), pp. 259–272. Available at: https://doi.org/10.24258/jba.v20i3.1457.

Lewis, B.D. (2017) 'Local government spending and service delivery in Indonesia: The perverse effects of substantial fiscal resources', Regional Studies, 51(11), pp. 1695–1707. Available at: https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1216957.

Leyton-Flor, S.A. and Sangha, K. (2024) 'The socio-ecological impacts of mining on the well-being of Indigenous Australians: A systematic review', The Extractive Industries and Society, 17, p. 101429. Available at: https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101429.

Malinda, R. (2025) 'Dispossession, extractive capitalism and political reactions from below in West Papua', Journal of Agrarian Change, 25(4), p. e70032. Available at: https://doi.org/10.1111/joac.70032.

Mseke, E.P., Jessup, B. and Barnett, T. (2024) 'Impact of distance and/or travel time on healthcare service access in rural and remote areas: A scoping review', Journal of Transport & Health, 37, p. 101819. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jth.2024.101819.

Muksiin, D. et al. (2021) 'Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua', JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(2). Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11817.

Pouw, N. and Gupta, J. (2017) 'Inclusive development: a multi-disciplinary approach', Current Opinion in Environmental Sustainability, 24, pp. 104–108. Available at: https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.11.013.

Prabowo, P.A. et al. (2021) 'Special autonomy policy evaluation to improve community welfare in Papua province Indonesia', International Journal of Excellence in Government, 2(1). Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJEG-06-2019-0011?urlappend=%3Futm_source%3Dresearchgate.net%26utm_medium%3Darticle.

Pritchett, L., Woolcock, M. and Andrews, M. (2013) 'Looking like a state: Techniques of persistent failure in state capability for implementation', The Journal of Development Studies, 49(1), pp. 1–18. Available at: https://doi.org/10.1080/00220388.2012.709614.

Republik Indonesia (2022) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Robeyns, I. (2017) Wellbeing, freedom and social justice: The capability approach re-examined. Cambridge: Open Book Publishers. Available at: https://doi.org/10.11647/OBP.0130.

Scheidel, A. et al. (2023) 'Global impacts of extractive and industrial development projects on Indigenous Peoples' lifeways, lands, and rights', Science Advances, 9(23), p. eade9557. Available at: https://doi.org/10.1126/sciadv.ade9557.

Stylianou, T. et al. (2025) 'Inclusive human development and governance: A panel data analysis of selected Asian countries', Frontiers in Political Science, 6, p. 1446044. Available at: https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1446044.

Uluwiyah, A., Nachrowi, N.D. and Nuryakin, C. (2025) 'Regional proliferation in Indonesia: Impact on manufacturing outcomes and firm survival', Asia-Pacific Journal of Regional Science, 9(2), pp. 419–447. Available at: https://doi.org/10.1007/s41685-025-00373-x.

World Bank (2025) Poverty & inequality update: Fall 2025. Washington, DC: World Bank. Available at: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/229ff18129687a785f08af7cfb28e5e1-0350012025/original/WBG-Poverty-and-Inequality-Update-Fall-2025.pdf.